



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 664250

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.245.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 374 m2/300 m2 di KAB / KOTA GRESIK, WARISAN Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/139 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/75 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah Seluas 218 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
5. Tanah Seluas 345 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000
6. Tanah Seluas 249 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m2/6 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **146.200.000**

1. MOBIL, YARRIS STATION Tahun 2011, WARISAN Rp. 110.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOTOR, SUZUKI BEBEK Tahun 2007, WARISAN Rp. 3.200.000
4. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.



20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 4.090.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 279.066.197

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 8.760.266.197

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.760.266.197

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.